BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Membangun masyarakat yang berpendidikan akan berdampak pada kemajuan negara dalam hal moral, agama, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, dan peradaban, serta ketahanan negara. Dengan kata lain, sebuah negara tidak ingin meninggalkan generasi yang tidak kuat karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dapat membantu generasi berikutnya menjadi lebih kuat secara fisik dan mental. Ketika datang ke pendidik, termasuk guru dan dosen, itu adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh alat teknologi apa pun dalam kehidupan nasional. Mengantisipasi kehadiran karyawan seperti guru dan tenaga pendidik lainnya adalah wajar, terutama di negara berkembang. Kualitas pendidik, pengajar, dan dosen ditentukan oleh seberapa baik mereka melaksanakan tugas mereka sehubungan dengan seberapa mudah seseorang sebagai manusia dapat memenuhi kebutuhan pembangunan (Alkapitani, 2022).

Dalam dunia pendidikan, sebutan guru dikenal sebagai pendidik dalam jabatan. Pendidik jabatan yang dikenal banyak orang adalah guru, sehingga banyak pihak mengidentikkan pendidik dengan guru. Sebenarnya banyak spesialisasi pendidik baik dalam arti teoritis maupun praktisi yang pendidik tapi bukan guru. Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat professional. Secara istilah profesi biasanya diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Everett Hughes yang dialih bahasakan oleh Piet Sahertian, menjelaskan bahwa istilah profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat urgen karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera pada pasal 4: “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”(Efendi & Hakim, 2022).

Misi luar biasa yang harus diselesaikan adalah mengajar dan mendidik anak-anak negeri, dan melakukannya dengan menugaskan seorang guru dan dosen untuk setiap individu muda. Karakter seorang guru dan dosen juga ditandai dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri, pengorbanan diri, dan keyakinan bahwa setiap tetes keringat mereka setara dengan benih. Akibatnya, profesi guru dan dosen dianggap penting karena mereka berkontribusi langsung dalam pembangunan bangsa ini.

Dalam menjalani segala aspek kehidupannya, setiap individu, lembaga, dan organisasi berhak atas status dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, termasuk status dan perlindungan dalam hal tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan hukum lainnya. Negara ini adalah negara hukum yang setiap komponennya berhak atas status dan perlindungan hukum (Yani & Mahdi, 2024). Batang Tubuh UUD 1945 menetapkan hak atas pendidikan Warga Negara Indonesia (WNI) baik sebelum maupun sesudah perubahan. Pasal 31 UUD 1945 menetapkan hak atas pendidikan, menyatakan bahwa (1) setiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang (maya selviana, 2024 dalam Yani & Mahdi, 2024). Pengaturan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kesempatan bagi semua warganya untuk belajar.

Sebagai pendidik profesional, guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya secara optimal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara (Budoyo, 2022). Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Semua guru memiliki kepribadian unik; mereka harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Namun, jika siswa melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib, guru harus tegas. Oleh karena itu, kepribadian seorang guru

seolah-olah terdiri dari dua bagian: satu yang empati dan yang lain yang kritis (lailasari ekaningsih, 2024).

Meskipun guru bertanggung jawab secara strategis untuk menghasilkan generasi penerus yang cerdas dan berkarakter, mereka seringkali berada dalam posisi yang rentan saat menghadapi konflik dengan siswa atau orang tua. Hal ini terbukti dalam kasus Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan (S, 2024).

Tugas guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik seseorang menjadi warga Negara yang baik, menjadi seorang yang berprilaku baik dan utuh. Mengarahkan siswa untuk menemukan identitasnya dan kemanusiaannya adalah tugas guru. Guru bukan hanya bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan tetapi juga bertanggung jawab untuk mentransfer nilai (Efendi & Hakim, 2022). Bukanlah tugas yang mudah untuk membentuk perilaku yang memberikan pendidikan dan pengajaran. Untuk membina siswa, ketekunan dan kesabaran diperlukan. Sebelum memulai pekerjaan mereka sebagai pendidik, guru harus membangun kebiasaan dan profesi, penugasan diri, dan kesadaran tanggung jawab dalam menjalankan tugas utama mereka sebagai pendidik.

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan hak-hak kesejahteraannya, tetapi juga lebih luas termasuk perlindungan individu guru yang bersangkutan agar mereka dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Ketika seorang guru memberikan pendisiplinan kepada siswanya, dia pasti berusaha untuk membuat siswanya memiliki moral dan etika yang baik. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dan mengembangkan individu-individu Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang teguh dan mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial dan nasional (Sidik, 2021).

Pendidikan sangat penting untuk kemajuan negara, masyarakat, dan individu. Oleh karena itu, tidak hanya negara yang bertanggung jawab atas pendidikan yang baik, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan mengelola pendidikan mereka sendiri (Lubis, 2021).

Perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menghargai peran guru. Kedua undang-undang tersebut menetapkan bahwa guru harus memiliki hak-hak dasar seperti kesejahteraan yang layak, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Menurut prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan ini, guru, pemerintah, dan masyarakat umum memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama undang-undang dalam sistem pendidikan. Guru harus menerima upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk terus belajar. Menurut prinsip keadilan ini, hak-hak guru harus diberikan secara setara tanpa membedakan status pekerjaan mereka, tempat mereka bekerja, atau jenjang pendidikan yang mereka ajarkan. Diharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini akan menciptakan lingkungan kerja yang ideal di mana pendidik dapat melakukan tugas mereka dengan cara terbaik untuk mengembangkan potensi peserta didik mereka (umar iskandar. darni asis, et.al., 2024).

Selain itu, setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, terlepas dari pekerjaan dan profesinya. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," kata ayat (1) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 (Setiawan & Mina, 2021). Dalam menjalankan perannya sebagai pengajar, guru perlu memberikan penekanan khusus pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan pentingnya peran guru dalam sistem pendidikan, di mana mereka tidak hanya bertanggung jawab atas transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai pada diri siswa (Irahana, 2024).

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 memang sangat perlu di dalam dunia pendidikan karena dapat memberikan perlindungan bagi siswa namun dengan di perkuatnya undang-undang tersebut dan melemahkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dapat menimbulkan dampak yang besar bagi dunia pendidikan. Dimana guru tidak bisa kondusif dalam melakukan

kegiatan pembelajaran sehingga dapat menurunkan moral siswa. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. (Florentina Nining Hastiani, 2022) mengatakan bahwa Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar berita tentang banyak kasus kekerasan terhadap guru yang disebabkan oleh pembiaran guru ketika mereka menanggapi perilaku menyimpang atau kenakalan siswa mereka. Saat ini, banyak guru yang takut untuk bertindak karena akan melanggar HAM, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menangani masalah siswa yang menyimpang. Selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, guru juga sering menjadi korban kekerasan dari siswa dan atau orang tua mereka sendiri. Beberapa contoh dapat dilihat dari internet, bapak zuharman adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu dipolisikan sampai di ketapel oleh siswanya sendiri karena menegur siswanya yang sedang merokok. Ibu supriyani adalah seorang guru honorer yang berasal dari konawe di penjara akibat dugaan penganiayaan siswa. ahmad Guntur salah seorang guru dari jambi yang di laporkan kepolisi karena menampar siswanya yang sedang melihat film porno pada saat jam pelajaran(Nanang et al., 2022). Berdasarkan masalah di atas sudah terlihat jelas bahwa profesi guru sangat terancam. Yang mengakibatkan pembelajaran yang tidak kondusif, guru yang takut untuk memberikan sanksi jika melanggar peraturan sekolah dan penurunan moral siswa yang tidak bisa lagi di bina oleh guru.

Selain itu, masalah yang terjadi ini disebabkan oleh orang tua siswa yang tidak memahami bahwa guru melakukan apa yang mereka lakukan untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa yang berperilaku menyimpang atau nakal. Hukuman disiplin guru dahulunya dianggap normal. Namun, sekarang dianggap melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, guru menghadapi dilema: mereka harus menjaga disiplin dan tata tertib sekolah, tetapi mereka juga khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atas tuduhan kekerasan terhadap anak mereka di sekolah. Dengan demikian, guru menjadi tidak tegas terhadap siswa yang menyimpang. Kemudian para siswa nakal tersebut dibiarkan, sebagai bentuk ketakutan jika akan dipermasalahkan dengan hukum. Ketidak tegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa yang nakal (Florentina Nining Hastiani, 2022) .

Sangat disayangkan ketika guru memberikan pelajaran akhlak yang baik bagi siswa, malah orang tua siswa maupun peserta didik tersebut melakukan perlawanan dengan melaporkannya kepada kepolisian. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat terhadap profesi guru. Yang membuat profesi guru menjadi tidak ada harganya. Semua kejadian diatas menjadi bukti bahwa keprofesin guru, tenaga pendidik, dosen dan lain-lain sangat di pandang rendah oleh sebagian masyarakat. Saat ini ketika guru melakukan tindakan pendisiplinan itu artinya guru berada dalam masalah besar, yang mungkin saja kejadian-kejadian tersebut akan terulang lagi (Sidik, 2021).

Jika moral anak tidak bisa dibimbing lagi lantas bagaimana menjadikan generasi bangsa menjadi generasi yang bermoral dan beretika baik. Sementara alat yang digunakan untuk menumbuhkan moral mereka sudah terancam. moral adalah pengetahuan yang melibatkan kepribadian manusia yang memiliki adab. Moral erat kaitannya dengan kemampuan antara perilaku benar dan salah, sehingga moral dapat dikatakan salah satu komponen pengendalian watak. Mengenai konsep degradasi moral tersebut, dapat dikatakan bahwa degradasi moral ialah turunnya perilaku positif manusia, dalam hal ini anak didik, dikarenakan akhlak dan kepribadian anak didik semakin menurun dalam semua aspek moral, mulai dari ucapan, perkataan, berpakaian yang tidak sesuai dan lain-lain. Moral yang seharusnya menjadi pengendali perilaku semakin terkikis dan ini disebut degradasi moral (Atiqah revalina, isnarmi moeis, 2023).

Penurunan moral siswa dan kekhawatiran guru saat ini sudah terjadi di salah satu sekolah yang ada di kabupaten labuhan batu yaitu SMP Negeri 1 Rantau selatan. Kejadian ini menjadi alasan bagi peneliti kenapa memilih SMP Negeri 1 Rantau Selatan sebagai tempat penelitian. Guru-guru SMP Negeri 1 Rantau Selatan sangat takut untuk di laporkan ke kepolisian karena berita yang beredar di media social. Akibatnya pembelajaran di sekolah menjadi sangat tidak kondusif. Guru-guru di SMP Negeri 1 Rantau Selatan banyak yang membiarkan siswanya ribut saat di kelas, membiarkan siswanya berkata-kata kasar, dan membiarkan siswanya tidak memiliki sopan santun hanya karena mereka takut untuk menegur siswanya, disebabkan dari kuatnya perlindungan anak dan sangat lemahnya perlindungan untuk guru. Fakta bahwa di SMP Negeri 1 Rantau Selatan

moral siswa terjadi penurunan dapat dilihat pada saat peneliti melakukan observasi ke sekolah tersebut. Peneliti melihat siswa yang ketahuan sedang merokok, siswa yang tidak disiplin, tidak mematuhi peraturan sekolah, kata-kata siswa yang kasar, dan siswa yang menyepelekan kehadiran kelas. Sampai ada satu kasus yang menimpa salah satu guru di SMP Negeri 1 Rantau Selatan dimana salah satu siswanya tidak hadir kesekolah selama sebulan dan tidak mengikuti ujian kelulusan sampai guru tersebut menjemput paksa siswa tersebut untuk melakukan ujian kelulusan. Namun pada akhirnya anak tersebut dapat lulus dan nilai anak tersebut tidak bisa di rendahkan. Dengan penjelasan di atas sangat jelas bahwa penurunan moral yang sangat miris sudah terjadi di SMP Negeri 1 Rantau Selatan dan terlihat jelas bahwa guru tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan guru terhadap pengaduan siswa nya. Hal ini juga di akibatkan dari kurangnya peran orang tua di rumah sehingga membiarkan anaknya untuk berperilaku tidak baik.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PERLINDUNGAN GURU TERHADAP PENURUNAN MORAL SISWA DITINJAU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 1 RANTAU SELATAN)”.

1.2.Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu bagaimana perlindungan guru terhadap penurunan moral siswa yang akan ditinjau pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di SMP Negeri 1 Rantau Selatan.

1.3.Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan guru terhadap penurunan moral siswa ditinjau pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di SMP Negeri 1 Rantau Selatan.

1.4. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari tahu tentang bagaimana perlindungan guru terhadap penurunan moral siswa ditinjau pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di SMP Negeri 1 Rantau Selatan.

1.5. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Manfaat bagi peneliti
Dapat memperluas pengetahuan tentang kajian mendalam dari perlindungan guru selama melakukan pekerjaan di lingkungan yang di tinjau dari undang-undang nomor 14 tahun 2005.
 - b. Manfaat bagi perguruan tinggi
Memberikan kontribusi ilmiah berupa informasi teoritik kepada kampus tentang pemahaman bahwa moral anak perlu di perhatikan dan dapat mengintegrasikan nilai moral dalam seluruh kegiatan akademik. Serta menjadi suatu penguatan dan pengembangan teori tentang perlindungan hukum bagi guru dan dosen.
 - c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa di kembangkan menjadi lebih sempurna.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan bagi guru. Dan dapat menjadi pendorong dalam menegakkan moral siswa yang lebih baik.
 - b. Dapat menjadi acuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, aktif dan kondusif. Sehingga guru dapat mengajar dengan aman dan moral siswa yang tumbuh dengan baik.